

# Kepentingan Amerika Serikat dalam Menerapkan Standar Ganda Pada Kebijakan Luar Negeri Terhadap ISIS dan Kelompok Pemberontak di Suriah (2013-2017)

Komang Adhy Permanasari<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, Anak Agung Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

---

## Abstrak

*Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan gerakan berhaluan ekstrimis yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. ISIS merebut kota-kota penting di Suriah dan ingin mendirikan sebuah negara khilafah. ISIS memiliki tujuan mendukung pemberontak Suriah serta menyerang target yang berafiliasi dengan pemerintah Suriah. Untuk melemahkan pemerintah Bashar Al Assad, Amerika Serikat membantu kelompok oposisi, yang melawan ISIS namun juga berusaha menggulingkan Bashar Al Assad. Hal ini tentu membuat pola standar ganda yang dilakukan oleh Amerika dalam merespon pergerakan kelompok berhaluan ekstrimis seperti ISIS, FSA, Al Nusra Front, di Suriah. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Amerika Serikat dalam menerapkan standar ganda secara bersamaan dalam satu negara dengan objek yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik kepustakaan dimana sumber data didapatkan dari buku, jurnal, dokumen serta sumber lainnya yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep kepentingan nasional dan standar ganda. Hasil dari penelitian ini adalah standar ganda yang dilakukan Amerika Serikat terkait ISIS dan kelompok ekstrimis lainnya di Suriah adalah untuk kepentingan militer, ekonomi dan politik seperti perluasan hegemoni, kendali atas perusahaan minyak di Suriah dan menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al Assad.

**Kata-kunci** : Amerika Serikat, Bashar Al Assad, ISIS, Standar Ganda, Suriah

---

## Abstract

*The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* is an extremist movement that poses a threat to the United States. ISIS has captured important cities in Syria and aims to establish a caliphate state. Its goal is to support Syrian rebels while attacking targets affiliated with the Syrian government. To weaken the government of Bashar Al Assad, the United States is supporting opposition groups that are fighting ISIS but also attempting to overthrow Bashar Al Assad. This creates a pattern of double standards carried out by America in responding to extremist groups such as ISIS, FSA, and Al Nusra Front in Syria. This research examines the role of the United States in implementing double standards simultaneously in one country with the same objective. The research method used in this study is a descriptive method using library techniques where data sources are obtained from books, journals, documents, and other sources, which are then processed and analyzed qualitatively. This study employs the framework of the concept of national interest and double standards. The result of this research is the double standard that the United States applies regarding ISIS and other extremist groups in Syria for military, economic, and political interests, such as expanding hegemony, controlling oil companies in Syria, and overthrowing the regime of Bashar al-Assad.

**Keywords** : United States, Bashar Al Assad, ISIS, Double Standard, Syria

---

## Kontak Penulis

Komang Adhy Permanasari

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan Gunung Rinjani Gang Patuha III No 51, 80119

Telp: 085156044928

E-mail : [adhypermanasari@gmail.com](mailto:adhypermanasari@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Keterlibatan Amerika Serikat pada konflik tidak bisa kita lepaskan dari serangkaian konflik yang terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang memiliki jalur pertemuan antara tiga benua diantaranya benua Afrika, benua Asia dan benua Eropa (Sihbudi, 2007). Kawasan ini kerap menjadi perebutan pengaruh serta kepentingan oleh negara – negara lain termasuk Amerika Serikat. Situasi semakin genting dengan munculnya gerakan perlawanan dari kelompok pemberontak berhaluan ekstremis yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), selain ISIS ada beberapa kelompok perlawanan lain di Suriah yang mendapat dukungan Amerika dalam perjuangannya menjatuhkan Bashar Al Assad, yaitu Jabhah Al Nusra dan Free Syrian Army.

ISIS adalah gerakan berhaluan ekstremis yang menginginkan untuk mendirikan sebuah negara *khilafah* atau Negara yang dipimpin dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam/Syariah (Murse, 2016). ISIS berkembang dan mampu menjadi momok bagi Amerika Serikat di Timur Tengah dengan aksinya merebut kota-kota penting di Suriah. ISIS melakukan perampokan bank, pemerasan pada penduduk tiap kota yang mereka kuasai untuk sumber dana selama ini (BBC, 2015). ISIS bergerak di Suriah dan memiliki tujuan untuk menggulingkan rezim Bashar Al Assad. Posisi Suriah di kawasan Timur Tengah memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat di Suriah adalah untuk memperluas hegemoni, dan perluasan hegemoni ini akan bisa dimulai dengan menjatuhkan Bashar Al Assad (Khatib, 2014). Untuk melemahkan pemerintah Bashar Al Assad, Amerika Serikat membantu kelompok oposisi, yang melawan ISIS namun juga berusaha menggulingkan Bashar Al Assad. Hal ini tentu membuat pola standar ganda yang dilakukan oleh Amerika dalam merespon pergerakan kelompok berhaluan ekstremis seperti ISIS, *Free Syrian Army*, Al Nusra Front, di Suriah.

Munculnya kelompok gerakan perlawanan berhaluan ekstrimis, membuat Amerika Serikat turun untuk terlibat langsung dan merilis pernyataan resmi presiden Obama oleh gedung putih yang menyatakan untuk mengizinkan serangan - serangan yang akan dilakukan untuk melawan ISIS (The White House, 2014). Keputusan Obama untuk melakukan serangan terhadap ISIS tidak lepas dari aksi ISIS yang dianggap mengancam posisi Amerika Serikat di Timur Tengah terutama Suriah, mengingat ISIS melakukan perebutan kota kota penting di Suriah. Namun, Amerika ternyata memberikan bantuan pada kelompok pemberontak lainnya (Al-Nusra Front dan Free Syrian Army) dengan dalih untuk memerangi ISIS. Keterangan ini diperkuat dengan pernyataan dari ketua parlemen di Suriah yang menyatakan bahwa Washington mendukung kelompok – kelompok pemberontak yang aktif di Suriah (ParsToday, 2016).

Bantuan yang disahkan Parlemen AS dalam bentuk pelatihan dan pemberian senjata untuk pemberontak Suriah. Parlemen telah menyelenggarakan pemungutan suara guna memperkuat pasukan oposisi melawan ISIS. Aljazeera melaporkan, sebanyak 273 anggota DPR menyetujui rencana Barack Obama untuk menghancurkan kelompok radikal ISIS. Sejumlah pejabat dari Partai Demokrat mengatakan langkah ini dapat membuka pintu bagi AS untuk mengintervensi peristiwa di Timur Tengah. DPR juga menyetujui permintaan Obama untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta dolar AS. Dana juga akan digunakan untuk memperkuat pemberontak di Suriah. Penjabaran diatas menunjukkan bahwa sebuah anomali dari sikap Amerika dalam merespon konflik yang terjadi di Suriah. Satu sisi, Amerika menginginkan pemerintahan Bashar Al Assad berakhir, untuk melebarkan hegemoninya di kawasan Suriah dengan membangun pangkalan militer disana yang selama ini diduduki Rusia. Strategi Amerika dengan cara menggulingkan pemerintahan Bashar Al

Assad adalah dengan memanfaatkan kelompok kebencian dan usaha pemberantasan yang dilakukan kelompok perlawanan yang anti pada rezim Amerika Serikat terhadap kelompok ekstrimisme Bashar Al Assad. Dengan melakukan pendanaan Islam adalah karena Amerika Serikat secara terang-terangan dan pelatihan, Amerika mendanai kelompok yang terangan mendapatkan perlawanan dari kelompok satu namun memerangiyang lain. Inilah standar ini, serta berpotensi mengganggu kepentingan ganda Amerika dalam upaya menjatuhkan rezim Amerika Serikat dengan melakukan aksi-aksi nekat Bashar Al Assad, mendukung pemberontak yang dapat membuat kekacauan. Selain itu, dengan senjata senjata berat dan perang antara ketakutan akan jatuhnya teknologi nuklir ke tangan sesama pemberontak yang akhirnya menewaskan kelompok ekstrimis Islam juga mejadi penguat banyak rakyat sipil. Hal ini sangat kontras dengan alasan Amerika Serikat melakukan tindakan-slogan dan kampanye mendukung kemanusiaan tindakan tersebut di Timur Tengah. Untuk dan melindungi warga sipil yang selama ini mengamankan kepentingannya, AS menempatkan dikedepankan Amerika, karena pada pasukan militer dengan jumlah yang cukup banyak kenyataannya pendanaan yang dilakukan oleh di kawasan tersebut. Dengan cara itulah tiga Amerika pada pemberontak membuat konflik kepentingan yang telah disebutkan tadi dapat kian berlarut, antara kelompok pemberontak *Free* terlaksana. Dalam pengembangan penelitian ini, *Syrian Army* (FSA), Al Nusra Front dan ISIS yang penulis memiliki pendapat yang sama dengan menewaskan warga sipil, maupun serangan FSA, Bowman, bahwa ketakutan akan kelompok radikal Al Nusra Front pada kota kota yang dikuasai menjadi faktor intervensi Amerika di Timur Tengah. pemerintah Suriah yang banyak menewaskan warga sipil.

Penelitian ini menggunakan jurnal yang berjudul "*After Iraq: Future U.S. Military Posture in the Middle East (2008)*" yang ditulis oleh B. L Bowman. Bowman (2008) menjelaskan bagaimana sikap Amerika Serikat dalam kebijakannya di Timur Tengah pasca invasi Irak 2003 dan bagaimana kekhawatiran Amerika Serikat akan kebangkitan kekuatan perlawanan Islam dari Timur Tengah. Jika menarik korelasi dengan penelitian ini, Penulis terinspirasi dengan 3 gagasan kepentingan utama Amerika Serikat di Timur Tengah yang di kemukakan Bowman. Gagasan pertama adalah kepentingan untuk mengamankan minyak dari kawasan teluk Persia ke Amerika Serikat. Kedua, mengambil langkah preventif agar tidak terjadinya pengembangan, pemerolehan, ataupun penggunaan senjata pemusnah massal oleh aktor negara maupun non negara. Ketiga, menjaga agar kelompok ekstrimis Islam tidak masuk. Ekstrimisme Islam yang dimaksudkan ialah kelompok – kelompok yang berjuang menegakkan Negara Islam. Alasan

Kajian Pustaka kedua adalah penelitian dalam bentuk Thesis oleh H. Wahyudi yang berjudul "Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat dalam Merespon Kudeta Mesir 2013". Standar ganda sangat terlihat jelas pada AS melalui respon yang berbeda ketika memberi tanggapan terhadap kasus kudeta di Mesir dan kasus intervensi Amerika Serikat terhadap Irak dan Libya. Pada peristiwa kudeta yang terjadi di Mesir, AS tidak memberikan respon yang signifikan ataupun memberi perhatian yang lebih sebagai bentuk urgensi terhadap kasus ini, meskipun dalam kasus ini menimbulkan pelanggaran HAM serta demokrasi. Melihat peran AS yang dominan dalam setiap intervensi yang dilakukan di kawasan Timur Tengah, hal ini justru membuat publik bertanya mengenai respon AS saat itu. Namun, respon ini dituding mendapat pengaruh dari kemenangan *Ikhwanul Muslimin* sebagai politikal Islam yang berpotensi mengusik kestabilan politik dan urgensi Amerika Serikat di Timur Tengah. Respon Amerika Serikat terkait pelanggaran demokrasi dan HAM yang terjadi di Timur Tengah adalah membiarkan permasalahan terjadi tanpa melakukan penanganan

atau penghentian meski sikapnya tersebut dianggap menghinai landasan dan prinsip politik luar negerinya sendiri. Bukti lain yang menguatkan anggapan bahwa Amerika Serikat menerapkan standar ganda ialah reaksi negara sekutunya di Timur Tengah yang memandang *Ikhwanul Muslimin* (IM) seolah ancaman yang mengusik kestabilan politik dan kawasan Timur Tengah. Respon ini justru sangat berbanding lurus dengan respon AS pada kasus intervensi AS terhadap Libya dan Irak dimana Amerika Serikat menilai hal tersebut adalah upaya penegakan HAM dan demokrasi di kawasan tersebut. Penulis mendapatkan manfaat dari kajian politik luar negeri yang menjelaskan bahwa fenomena standar ganda bisa saja terjadi seiring dengan kepentingan politik luar negeri yang akan melahirkan kebijakan luar negeri. Perbedaan sudut pandang dari dua penelitian ini mengarahkan pada kesimpulan yang sama, Amerika melakukan standar ganda untuk melindungi kepentingannya, salah satunya adalah kepentingan dalam aspek ekonomi.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan standar ganda. Kepentingan nasional merupakan konsepsi umum yang sangat penting bagi negara karena merupakan faktor yang paling menentukan serta merupakan inti dan tujuan mendasar dari perumusan politik luar negeri oleh para pembuat keputusan. Kepentingan nasional berusaha menjaga keutuhan Negara. Jika menggunakan pendekatan realisme, kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara sebagai *unitary actor* yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan *survival* dari negara tersebut.

Konsep kepentingan nasional dalam hal ini diartikan sebagai kekuasaan. Konsep ini menjadi perantara gagasan yang berupaya mempelajari politik internasional dan kenyataan yang harus

diketahui. Konsep kepentingan yang diartikan sebagai kekuasaan, memaksakan disiplin intelektual kepada pengamat, memasukkan keteraturan rasional ke dalam pokok masalah politik, sehingga memungkinkan pemahaman politik secara teoritis. Kepentingan merupakan bentuk politik luar negeri suatu negara yang dilandasi oleh suatu tujuan yang sifatnya cenderung tetap dan jangka panjang. Tiga faktor yang meliputi politik internasional adalah sifat dan hakikat kepentingan nasional yang dibentengi, lingkungan politik dan kepentingannya, dan kepentingan yang logis. Tonggak fundamental politik luar negeri serta politik internasional adalah kepentingan nasional yang merupakan pemberi arah tindakan politik suatu negara.

Standar ganda merupakan penggunaan persyaratan yang berbeda untuk inferensi atau kesimpulan kepemilikan atribut. Standar ganda memiliki atribut seperti jenis kelamin, etnis, kelas sosial ekonomi yang menjadi dasar dalam pemberlakuan standar ganda (Foschi, 2000). Standar ganda adalah suatu kondisi yang membuat seseorang menilai aksi, sikap atau tindakan yang berbeda pada sekelompok maupun perseorangan tertentu pada kasus yang sama. Penerapan standar ganda ini umumnya terjadi di masyarakat hingga level sebuah negara, secara tidak langsung standar ganda secara mudah dapat diartikan sebagai sebuah inkonsistensi sikap dalam menilai suatu hal yang sama yang akan menghasilkan hasil berbeda. Standar ganda dalam hal ini menyangkut bagaimana sikap serta kebijakan luar negeri yang dianut, dihasilkan dan dijalankan suatu negara secara tidak konsisten. Prinsip kebijakan luar negeri bersumber berakar dari nilai-nilai kemanusiaan universal dan norma internasional (Perwita & Yani, 2005). Amerika Serikat sebagai aktor global kerap dianggap sebagai pelaku standar ganda dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya. Hal tersebut terlihat dari sikap Amerika Serikat yang hadir sebagai pahlawan demokrasi dunia yang menjunjung tinggi penerapan hak asasi

manusia dan kedamaian, namun bertolak **Latar Belakang Sejarah Terbentuknya ISIS dan** belakang dengan apa yang terjadi dimana **Kelompok Pemberontak Lainnya di Suriah** Amerika Serikat bertindak amoral, suka ikut ISIS bermula dari kelompok radikal yang bernama campur, dan sewenang-wenang demi Jama'at al-Tauhid wa al-Jihad yang muncul pada kepentingannya. tahun 1999 dari Yordania. Kelompok ini

Penggunaan dua kerangka konsep diatas membentuk jaringan desentralisasi selama akan membantu penulis dalam menjelaskan pemberontakan di Irak. Camp Bucca merupakan mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat penjara yang berada di daerah terpencil padang dalam menerapkan standar ganda pada pasir bagian selatan Irak. Penjara ini didirikan oleh pergerakan ISIS dan kelompok pemberontak pasukan AS pada tahun 2003. Camp Bucca Suriah pada penelitian ini. Hal ini kemudian menampung sebagian besar para teroris yang menjadi menarik karena Amerika Serikat memiliki bergabung di jaringan *Al-Qaeda* sehingga penjara ini kebijakan politik luar negeri yang cenderung menjadi tempat permulaan proses pergerakan diplomatis, namun tetap berperan aktif dengan kelompok-kelompok ekstrimis tersebut. Tempat pendanaan dan pelatihan militer pada kelompok inilah awal mula narasi atau cerita terciptanya ISIS. kelompok pemberontak meski membuat perang Dalam buku berjudul "*Negara Islam (IS/ISIS); Akar-saudara* semakin pelik dengan segala pelanggaran *Akar, Kebuasan, Masa Depan*" seorang kolumnis HAM nya, padahal Amerika selalu menjadikan terkemuka Timur Tengah, Abdel Bari Atwan alasan HAM dan Sipil dalam intervensinya pada mengatakan bahwa cara-cara kekerasan yang konflik konflik di Negara lain, standar ganda dilakukan ISIS bertujuan untuk menakuti-nakuti dan membuat penelitian ini semakin menarik untuk menjatuhkan mental musuh-musuhnya. dikaji.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik kepustakaan. Sumber data didapatkan dari buku, jurnal, dokumen serta sumber lainnya yang berkaitan mengenai standar ganda Amerika Serikat terkait ISIS dan kelompok pemberontak lainnya di Suriah, kemudian hasil dari sumber – sumber tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh merupakan data sekunder. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara yaitu Amerika Serikat dan Suriah. Penelitian ini mengumpulkan data, melakukan strukturisasi data, verifikasi ulang terhadap data yang dikumpulkan, hingga penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari Analisa inilah yang kemudian disusun dalam bentuk narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurutnya, ISIS bukan didirikan oleh Amerika Serikat, "Saddamlah yang dengan kegiatannya, gagasan dan suplai perbekalannya melaksanakan pengagendaan bagi ISIS, entah secara kebetulan ataupun memang didasari perencanaan yang matang." Atwan mengemukakan bahwa saat Saddam mengetahui Amerika Serikat memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahannya, dia segera mencari-cari jalan untuk mendirikan "entitas Islam" dan "jihad Islam" dengan tujuan utama untuk melawan aksi pendudukan yang mungkin terjadi di Irak. Inisiatifnya mendapat dukungan atas munculnya gelombang baru gerakan jihadis Salafi yang mulai terbentuk sejak awal dekade 1990-an dan didukung oleh beberapa negara jiran Irak (Atwan, 2015).

**Kelompok Pemberontak Free Syrian Army (FSA)** Free Syrian Army (FSA) atau Tentara Pembebasan Suriah dibentuk atas inisiatif Amerika di Doha, Qatar. Kelompok pemberontak ini berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin yang telah menjadi kelompok atau faksi oposisi terbesar dan paling mapan yang

ada di Suriah. FSA memiliki jumlah anggota Hayat Tahrir al-Sham (HTS) adalah perubahan nama sekitar 50.000 orang, gabungan dari mantan Jabhat al-Nusra yang dilakukan pada 28 Januari 2017. pejuang militer dan sipil. Dari sekian banyak Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil kelompok pemberontak yang terdapat di Suriah, survei dan wawancara,

FSA adalah salah satu sekutu utama Amerika ada delapan divisi di dalam HTS, yaitu militer, dalam upaya menggulingkan Pemerintahan keamanan, layanan, hukum agama, pengadilan, Bashar Al Assad. FSA mendapat suplai dana dan media, keuangan, dan politik. Pada dasarnya, senjata serta dukungan Amerika dalam forum Jabhat al-Nusra/HTS adalah aliansi kelompok forum internasional, termasuk dalam langkah bersenjata. Hasil perubahan identitas yang dialog, maupun mengupayakan gencatan senjata dilakukan pada Januari 2017, HTS berisi kelompok-kelompok seperti "Jabhat Ansaruddin", "Nur al-Din al-Zenki", "Liwa al-Haqq", dan "Jaysh al-

### **Kelompok Pemberontak Jabhat al-Nusra**

Jabhat al-Nusra (atau juga bisa disebut dengan Sunna" (Joscelyn, 2017).

Front al-Nusra) merupakan kelompok ekstremis Sunni dalam pergolakan di Suriah yang berbasis dan menganut ideologi jihad global al-Qaeda. Pada akhir tahun 2011, Al-Qaeda di Irak (AQI) dikirim ke operasi Suriah untuk membangun Jabhat Al-Nusra/ Front al-Nusra untuk melawan rezim Presiden Bashar Al Assad. Kelompok ini mengumumkan kehadirannya di Suriah dalam sebuah pernyataan video yang disebarluaskan melalui kanal *YouTube* pada Januari 2012. Jabhat al-Nusra dipimpin oleh Abu Muhammad al-Jaulani yang memiliki hubungan dengan AQI. Pada awal April 2013, pemimpin AQI pada saat itu yakni Abu Bakar Al Baghdadi Al-Husseini al-Quraisy mengumumkan Jabhat al-Nusra akan bergabung dengan AQI di bawah bendera ISIS. Terkait dengan deklarasi ISIS, Al-Jaulani mengatakan dirinya tidak diundang untuk membahas peleburan perjuangan tersebut. Namun, Al-Jaulani juga tidak menentangnya. Ia hanya menegaskan bahwa ia dan kelompoknya akan terus menggunakan nama Jabhat al-Nusra. Al-Jaulani menginformasikan bahwa Jabhat al-Nusra berhubungan dekat dengan AQI dan menyampaikan apresiasi atas bantuan uang dan pasukan yang mereka berikan. Al-Jaulani juga menekankan bahwa Jabhat al-Nusra merupakan perjuangan jihad rakyat Suriah (Sulaeman, 2013:132).

### **Kelompok Pemberontak Tahrir Al Syam**

kelompok seperti "Jabhat Ansaruddin", "Nur al-Din al-Zenki", "Liwa al-Haqq", dan "Jaysh al-Sunna" (Joscelyn, 2017).

### **Langkah Diplomati Amerika Serikat di Suriah**

Adanya pemberontakan di Suriah membuat AS harus turun tangan. Sikap keras dan standar ganda yang dibuat oleh AS sendiri sebenarnya salah satu upaya dari kepentingan nasionalnya untuk menahan kekuatan lain melawan kekuatan AS itu sendiri, seperti halnya di kawasan Timur Tengah yang merupakan kawasan yang telah dihegemoni oleh AS, dengan begitu AS ingin menguasai kawasan tersebut dan tidak ingin adanya kekuatan lain yang memasuki kawasan tersebut. Amerika Serikat tidak ingin mengharmonisasikan hubungan diplomatiknya dengan rezim Bashar Al-Assad, AS sebetulnya telah menangguk hubungan diplomatik dengan Suriah ini sejak tahun 2012 dan juga tidak mendorong negara lain untuk melakukan hal itu. Hal ini didasari oleh kekejaman yang telah dilakukan oleh rezim Bashar Al-Assad pada rakyat Suriah. Menurut Amerika Serikat bahwa pemerintahan Assad ini tidak akan mendapatkan kekuasaan di mata AS, dan tidak ingin mengharmonisasikan hubungan keduanya, hal ini adalah salah satu *statement* terkuat AS untuk Suriah. AS memiliki kepentingan dalam konflik di Suriah yaitu ingin membuat ISIS kalah secara permanen dan akan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Suriah (Young, 2013).

AS menerapkan sanksi ekonomi sebagai Langkah diplomatiknya yang diterapkan adalah

dengan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha Suriah yang diklaimnya berada di pusat perdagangan. Departemen Keuangan AS juga mengumumkan sanksi terhadap Cypriot dan pengusaha Rusia yang mereka alokasikan telah membantu Suriah menghindari sanksi internasional, termasuk Kirsan Ilyumzhinov, Kepala Federasi Catur Dunia. Empat individu dan enam entitas yang terdaftar oleh Departemen Keuangan akan memiliki aset apapun di AS yang dibekukan dan akan dilarang melakukan bisnis dengan perusahaan AS atau individu.

### **Peran Aktif Amerika Serikat dalam melawan ISIS di Suriah**

Koalisi yang dipimpin AS memulai serangan udara melawan ISIS di Irak pada 7 Agustus 2014, dan memperluas kampanye ke Suriah bulan berikutnya. Pada tanggal 15 Oktober, Amerika Serikat menamai kampanye itu *Operation Inherent Resolve* (OIR). Selama setahun berikutnya, Amerika Serikat melakukan lebih dari 8.000 serangan udara di Irak dan Suriah (Yacoubian, 2018). Pada tahun 2015, ISIS diperluas menjadi jaringan afiliasi di setidaknya delapan negara lain. Cabang, pendukung, dan afiliasi semakin dilakukan serangan di luar perbatasan yang disebut khalifah. Pada bulan Oktober, afiliasi ISIS Mesir mengebom pesawat Rusia dan menewaskan 224 orang disusul tanggal 13 November dengan jumlah korban tewas sebanyak 130 orang dan lebih dari 300 terluka dalam serangkaian serangan terkoordinasi di Paris, dan pada bulan Juni 2016 di sebuah klub malam seorang pria bersenjata yang berjanji mendukung ISIS menewaskan setidaknya 48 orang di Orlando, Florida. Pada Desember 2017, Khalifah ISIS telah kehilangan 95 persen wilayahnya termasuk Mosul yang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Irak. ISIS juga kehilangan wilayah besar lainnya yaitu Raqqa yang terletak di Suriah utara. Pada 9 Desember 2017, terdapat pernyataan kemenangan atas negara Islam di Irak oleh Perdana Menteri Irak Haider al Abadi. Akan tetapi ISIS masih

menginspirasi dan melakukan serangan diseluruh dunia, termasuk New York City.

Militer AS dan mitra koalisinya 29 negara yang menyumbang dukungan militer sebaliknya memainkan peran pendukung, terutama menyumbang kekuatan udara kritis untuk memerangi operasi. Sebagai contoh, tenaga udara menghentikan serangan ISIS 2014, khususnya menyelamatkan Baghdad, Erbil, dan Kobani. Serangan udara strategis kemudian melemahkan keuangan ISIS dengan menargetkan cadangan uang tunai dan bisnis minyak. Mitra Irak dan Suriah tidak akan mampu merebut kembali wilayah dari ISIS tanpa koalisi kekuatan udara, yang memberikan intelijen penting dan serangan presisi dan memperkuat kepercayaan dan motivasi pasukan mitra terhadap musuh yang menakutkan. Pada bulan September dan Oktober 2014, ISIS bergerak maju ke kota kecil Kobani yang terletak di perbatasan Turki-Suriah. Kelompok jihad masih menyampaikan udara tak terkalahkan, menyebabkan puluhan ribu orang Kurdi melarikan diri dari kota itu. Diperkirakan 4.000 pejuang ISIS maju ke kota dengan senjata berat, sementara sebagian besar pembela Kurdi Kobani hanya memiliki senjata kecil. Pada waktu itu, Amerika Serikat tidak memiliki pasukan di darat dan hanya melakukan operasi tempur terbatas di Suriah. Tetapi karena fleksibilitas, kecepatan, dan jangkauannya, tenaga udara bisa dengan cepat bergeser dari memegang garis depan di Irak menjadi bergelombang di atas Kobani ketika pasukan ISIS berkumpul dan menampilkan diri sebagai target. Koalisi dengan cepat mendirikan patroli udara tempur di atas kota 24 jam sehari (Syuryansyah dan Feraera, 2020).

Peran Amerika Serikat mengambil kepandaian dari upaya tersebut, karena kebanyakan anggota koalisi dilarang beroperasi di Suriah. ISIS mencoba untuk membuat berdiri di Kobani dengan mengalir bala bantuan ke dalam pertarungan untuk menunjukkan bahwa ia bisa menang melawan Kurdi Suriah dan menahan

koalisi kekuatan udara. Tapi pesawat AS memberikan serangan udara presisi, termasuk dalam situasi bahaya dekat dengan pasukan mitra, tanpa menempatkan pengendali udara terminal gabungan AS di garis depan. Kobani adalah yang paling agresif menggunakan tenaga udara pada saat itu di OIR.

### **Implementasi Standar Ganda dalam Kebijakan AS Terkait ISIS di Suriah Tahun 2013-2017**

Pada tahun 2000, Hafez yang merupakan ayah dari Bashar al Assad meninggal, Bashar al Assad kemudian memimpin Suriah. Namun, terdapat banyak warga Suriah yang memprotes mengenai kasus korupsi, angka pengangguran yang tinggi hingga kebebasan dalam berpolitik yang kurang saat dibawah kepemimpinannya. Pada Maret 2011, terjadi pemberontakan yang dimulai oleh pemberontakan negara-negara tetangga melawan penguasa yang represif. Pemberontakan tersebut terjadi di kota Daraa selatan karena demonstrasi pro demokrasi. Pemerintah Suriah pada saat itu memilih untuk menaklukkan tindakan-tindakan yang kiranya bertujuan untuk melakukan protes, menuntut pengunduran diri presiden secara nasional. Pendukung oposisi menyerang dengan mengangkat senjata. Terjadi kericuhan yang menyebar dan semakin intensif, pendukung oposisi melakukan hal tersebut untuk membela diri dan membersihkan wilayah mereka dari pasukan keamanan. Bashar al Assad berjanji untuk melawan dan menghancurkan "*Foreign-Backed Terrorism*" atau terorisme yang didukung pihak asing dan oposisi.

Tak lama setelah dimulainya pemberontakan Suriah, Presiden AS Barack Obama menyerukan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dalam bahasa yang sangat mengingatkan pada pernyataannya beberapa bulan sebelumnya tentang Muammar al-Qaddafi Libya, Obama mengatakan pada 18 Agustus 2013, bahwa presiden Bashar al Assad menghalangi rakyat Suriah dalam menentukan masa depan Suriah. Barack Obama juga mencatat bahwa Amerika

Serikat tidak dapat dan tidak akan memaksakan transisi ini ke Suriah, janji yang sebagian besar dia pegang ialah Amerika Serikat sebagian besar menolak seruan untuk campur tangan secara langsung dalam konflik dengan kekuatan militer. Pengecualian untuk kebijakan ini ancaman pemerintah untuk meluncurkan serangan rudal sebagai tanggapan atas serangan senjata kimia pemerintah Suriah dua bulan lalu tidak dilakukan, dan dalam hal apa pun tidak dimaksudkan untuk menjadi intervensi yang menentukan dalam perang. Satu-satunya intervensi AS dalam konflik Suriah sampai saat ini tidak langsung: program yang dijalankan CIA untuk melatih para pejuang yang terkait dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) serta penyediaan bantuan non-mematikan dan senjata ringan baru-baru ini kepada FSA.

Mengesampingkan keanehan membuat tuntutan tanpa niat untuk menindaklanjutinya atau memberi orang lain sarana untuk menindaklanjutinya apa efek dari menuntut perubahan rezim sebagai syarat untuk mengakhiri perang saudara seperti yang terjadi di Suriah? Menuntut perubahan rezim secara efektif menutup negosiasi dan memperpanjang perang, baik dengan mendorong pemberontak dan meminta rezim untuk bunuh diri. Ini juga menempatkan Assad dalam situasi yang tidak dapat dipertahankan: jika dia setuju untuk merundingkan jalannya ke pengasingan, mengingat yurisdiksi universal yang melekat dalam hukum pidana internasional, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan dituntut di kemudian hari atas kejahatan yang dia lakukan selama perang. Terakhir, kebijakan retorik perubahan rezim cenderung eskalasi menjadi kebijakan aktual perubahan rezim. Namun, peningkatan keterlibatan AS secara langsung atau tidak langsung dalam perang saudara Suriah saat ini, dapat menyebabkan kekejaman baru dan perang saudara lainnya. Jika Amerika Serikat membantu para pemberontak memenangkan perang dengan bantuan militer atau kekuatan udara, kemungkinan hasil yang pertama adalah pertumpahan darah melawan Alawi yang

kalah dan kedua perang saudara antara pemberontak “moderat” yang didukung oleh Barat dan Islamis yang lebih radikal, beberapa diantaranya berafiliasi dengan al Qaeda. Jika Amerika Serikat campur tangan dan menggulingkan Assad dengan pasukannya sendiri, kemungkinan akan menghadapi oposisi bersenjata dari faksi pemberontak radikal dan bahkan mungkin spoiler di antara faksi yang kurang radikal. Tidak ada opsi yang menarik. Menyabotase Negosiasi dengan Assad tidak memiliki masa depan sebagai presiden Suriah, Amerika Serikat telah secara efektif menggagalkan negosiasi yang berarti untuk mengakhiri perang tanpa kemenangan yang menentukan bagi satu pihak atau pihak lain. Alasannya ada dua. Pertama, dalam penggulingan Assad, Amerika Serikat pada dasarnya mendukung tujuan perang pemberontak. Pengetahuan bahwa satu-satunya negara adidaya di dunia mendukung politik utama mereka secara membuat para pemberontak semakin keras kepala. Seharusnya tidak mengejutkan, bahwa negosiasi Jenewa telah gagal karena pemberontak menolak untuk bernegosiasi dengan rezim Assad. Dalam pembicaraan Jenewa II yang dijadwalkan dibuka pada 23 November (Carpenter, 2018) misalnya, sekelompok sembilan belas pemberontak Islam mengatakan bahwa bernegosiasi dengan pemerintah Assad akan menjadi tindakan pengkhianatan. Demikian pula, Ahmed Jarba, presiden Dewan Nasional Suriah yang lebih moderat, menyatakan bahwa Sultan tidak dapat mengambil bagian jika itu memungkinkan Assad mendapatkan lebih banyak waktu untuk menumpahkan darah rakyat kami sementara dunia memandang. Demikian, kelompok pemberontak Suriah di seluruh spektrum ideologis menolak untuk berurusan dengan Assad, menuntut penggulingannya

sebagai prasyarat untuk pembicaraan. Kedua, Assad juga tidak memiliki insentif untuk bernegosiasi, karena dia diminta untuk menyetujui kematiannya sendiri dan pengucilan dari kekuasaan. Komunike London 11, yang dikeluarkan pada 22 Oktober, secara eksplisit menyatakan, Ketika *Transitional Governing Body* (Badan Pemerintahan Transisi) didirikan, Assad dan rekan-rekan dekatnya dengan darah di tangan mereka tidak akan memiliki peran di Suriah. Assad, bagaimanapun, tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan kekuasaan, dan baru-baru ini menyatakan bahwa dia tidak melihat hambatan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.

Singkatnya, dalam bahasa tawar-menawar, tidak ada ruang tawar-menawar di mana posisi kedua belah pihak tumpang tindih: pemberontak menuntut agar Assad pergi, dan Assad menolak. Amerika Serikat, dengan mendukung posisi pemberontak, berkontribusi pada kebuntuan ini. Dengan menuntut agar Assad meninggalkan kekuasaan adalah mencari tahu ke mana dia akan pergi. Di masa lalu, seperti yang ditunjukkan Daniel Krmaric, para pemimpin yang telah melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri seperti Idi Amin selalu bisa melarikan diri ke pengasingan yang nyaman di luar negeri jika mereka menghadapi pemberontakan yang kuat. Hukum pidana internasional kontemporer (ICL), bagaimanapun, bertumpu pada pilar kembar tanggung jawab individu dan yurisdiksi universal, yang berarti bahwa pembunuh massal bertanggung jawab atas tindakan mereka sebagai individu dan dapat ditangkap dan dituntut di mana saja.

Meskipun aspek-aspek ICL ini ditetapkan oleh Pengadilan Kriminal Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II, dinamika Perang Dingin pada umumnya tidak mendukung penuntutan. Namun saat ini, para pemimpin yang melakukan kekejaman lebih rentan, terutama jika mereka melarikan diri ke luar negeri. Jelas sulit untuk

menangkap kepala negara yang sedang menjabat lihat saja Presiden Sudan Omar Bashir, yang tetap bebas meskipun ICC mendakwanya pada tahun 2009. Tetapi para pemimpin yang bepergian ke luar negeri (seperti mantan diktator Chili Jenderal Augusto Pinochet) atau pergi ke pengasingan (mantan pemimpin Liberia Charles Taylor) lebih mudah ditangkap karena (1) mereka dapat dituntut di mana saja (Pinochet ditahan di Inggris dengan surat perintah penangkapan Spanyol), dan (2) menyatakan bahwa tuan rumah mantan diktator memiliki sedikit insentif untuk melindungi mereka dan dengan demikian dapat dibujuk untuk menyerah. Negara-negara mungkin berjanji untuk menjadi tuan rumah Assad sekarang dan melindunginya dari penuntutan, tetapi janji-janji ini tidak memiliki kredibilitas jika tuan rumah dikenakan sanksi atau dipermalukan di masa depan. Assad tidak punya tempat untuk pergi ke mana dia dapat dengan aman menghindari penuntutan, yang memberinya insentif yang jelas untuk mencoba tetap berkuasa di Suriah dengan memenangkan perang. Presiden di Suriah telah menolak eskalasi lebih lama, tetapi telah mulai mengambil langkah-langkah yang dapat menyebabkan keterlibatan AS yang lebih besar dalam konflik.

Misi merayap di Suriah adalah bahwa semakin besar keterlibatan AS, semakin bertanggung jawab untuk akibatnya, yang kemungkinan tidak menyenangkan. Dalam satu skenario, Amerika Serikat membatasi intervensinya untuk mempersenjatai dan melatih para pemberontak moderat. Jika pemberontak berhasil menggulingkan Assad, mereka kemungkinan akan mengambil pembalasan terhadap penduduk Alawit, yang bisa berdarah dan menciptakan bencana pengungsi baru. Hal kedua yang mungkin terjadi adalah perang saudara baru di antara faksi-faksi pemberontak, mungkin mengadu faksi-faksi Islamis yang lebih ekstrem melawan kaum moderat yang didukung AS. Dengan demikian, kebijakan AS akan

menukar satu perang saudara dengan perang saudara yang berbeda, dan menemukan dirinya kembali ke titik awal. Dalam skenario kedua, Amerika Serikat (dan sekutunya) melakukan intervensi secara langsung, menggunakan kekuatan militer untuk menjatuhkan rezim Assad. Ini juga kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang tidak menyenangkan, dengan komplikasi tambahan bahwa Amerika Serikat akan lebih terlibat. Jika strategi “palu dan landasan” kekuatan udara AS/NATO ditambah kekuatan darat pemberontak berhasil menggulingkan Assad, Amerika Serikat dapat mundur, tetapi tidak akan dapat mencegah pembalasan terhadap Alawi dan potensi perang saudara di antara faksi-faksi pemberontak yang diuraikan di atas. Jika Amerika Serikat memilih untuk mengirim pasukan darat, itu mungkin dapat mencegah pembantaian Alawi, tetapi kemungkinan akan menghadapi respons kekerasan dari faksi-faksi yang lebih radikal dan berafiliasi dengan al Qaeda. Mengingat sifat pemberontakan yang sangat terfaksinasi, sejumlah faksi dapat memainkan peran jika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan kekacauan Libya saat ini mungkin di luar jangkauan, karena ada banyak kelompok yang memusuhi Amerika Serikat di antara para pemberontak, ada populasi minoritas besar yang akan membutuhkan perlindungan, dan kemungkinan kelompok separatis (Kurdi) di timur laut. Kemungkinan besar Amerika Serikat akan menghadapi setidaknya satu, dan mungkin beberapa pemberontakan di Suriah, hasil yang sama seperti yang dihadapi di Afghanistan dan Irak.

Amerika Serikat benar-benar ingin mendorong akhir yang dinegosiasikan untuk konflik Suriah, ia perlu menghentikan desaknya agar Assad meninggalkan kekuasaan dan menekan kelompok pemberontak Suriah untuk bernegosiasi dengannya. Jika Amerika Serikat benar-benar berpikir Assad harus pergi, maka AS harus berhenti memaksakan negosiasi dan melakukan apa yang

diperlukan untuk membantu pemberontak menang. Dalam kasus terakhir, bagaimanapun, pemerintahan Obama harus berpikir panjang dan keras tentang apa arti kemenangan pemberontak di Suriah. Ia mungkin menemukan bahwa semakin ia memikirkannya, ia menjadi semakin tidak menarik. Menghentikan perubahan rezim dan mendorong negosiasi atau menghindarinya sama sekali mungkin merupakan kebijakan yang lebih bijaksana. Strategi ganda yang dilakukan ialah mengeluarkan pendanaan miliaran dolar Amerika Serikat menghabiskan sejak 2014 untuk pelatihan dan perlengkapan Pasukan Keamanan Irak (ISF) untuk pertempuran, 5 pasukan AS tidak dapat menghabiskan satu dolar AS pun untuk melatih atau memperlengkapi polisi lokal Irak dalam keamanan pemilu atau kontrol massa. Dana yang dibuat Kongres untuk mendukung perjuangan melawan ISIS tidak lagi cocok dengan misi. Sejak awal 2014, misi Operasi Inherent Resolve (OIR), dengan Koalisi Global Gabungan (CJTF) memimpin, adalah kekalahan ISIS di Irak dan Suriah dan untuk menetapkan kondisi operasi lanjutan untuk meningkatkan stabilitas regional.

ISF kini telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang dimiliki oleh ISIS di Irak, dan ISF kini telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang dimiliki oleh ISIS di Irak, dan ISF kini telah dikuasai oleh ISIS di Irak, operasi tempur melawan kelompok telah menurun sejak awal 2018. Dengan fisik khalifah hampir dikalahkan, CJTF telah mengalihkan fokusnya dari operasi tempur untuk mencegah kebangkitan ISIS melalui operasi stabilitas regional. Namun, dana yang sesuai untuk membantu ISF dan kelompok kualifikasi lainnya untuk melawan ISIS tidak mengizinkan CJTF mengejar stabilisasi penting dan upaya keamanan yang bertujuan untuk mengalahkan ISIS secara bertahan lama. Kongres belum mengesahkan *Counter-ISIS Train and Equip Fund* (CTEF) satu-satunya aplikasi AS yang tersedia untuk melatih dan memperlengkapi

pasukan asing di Irak dan Suriah untuk dukungan semacam ini. Sebaliknya, CJTF hanya boleh menggunakan CTEF untuk mendukung kelompok-kelompok berpartisipasi, atau mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan melawan ISIS. Semua yang dilakukan AS atas dasar kepentingannya untuk kepentingan ekonomi dan melebarkan hegemoninya.

### **Kepentingan Amerika Serikat Implementasi Standar Ganda di Suriah**

Amerika Serikat menjalankan standar ganda di Suriah untuk mewujudkan kepentingan dalam bidang militer, ekonomi dan politik. Kepentingan militer membuat Standar ganda Amerika Serikat tersebut ialah Amerika menginginkan pemerintahan Bashar Al Assad berakhir, untuk melebarkan hegemoninya di kawasan Suriah dengan membangun pangkalan militer disana yang selama ini diduduki Rusia. Strategi Amerika dengan cara menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad adalah dengan memanfaatkan kelompok-kelompok perlawanan yang anti pada rezim Bashar Al Assad. Dengan melakukan pendanaan dan pelatihan, Amerika mendanai kelompok yang satu namun memerangi yang lain. Inilah standar ganda Amerika dalam upaya menjatuhkan rezim Bashar Al Assad, mendukung pemberontak dengan senjata berat dan perang antara sesama pemberontak yang akhirnya menewaskan banyak rakyat sipil. Hal ini sangat kontras dengan slogan dan kampanye mendukung kemanusiaan dan melindungi warga sipil yang selama ini dikedepankan Amerika, karena pada kenyataannya pendanaan yang dilakukan oleh Amerika pada pemberontak membuat konflik kian berlarut, antara kelompok pemberontak *Free Syrian Army*- Al Nusa (FSA), *Al Nusa Front* dan ISIS yang menewaskan warga sipil, maupun serangan FSA, *Al Nusa Front* pada kota-kota yang dikuasai pemerintah Suriah yang banyak menewaskan warga sipil. Namun AS tetaplah AS dimana ia menerapkan standar ganda ini ada kepentingan di dalamnya untuk melebarkan sayap hegemoninya. Kepentingan

selanjutnya ialah kepentingan ekonomi yaitu misi militer Amerika Serikat sengaja di perluas di Suriah bagian timur yaitu untuk mengevakuasi lading minyak dan mengamankan petak besar tanah. Pertanian yang merupakan sumber penghasilan dari Suriah pun ikut diamankan oleh Amerika Serikat sebab ini merupakan salah satu penghasilan Suriah yang dapat diambil alih oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mempertahankan betul wilayah timur Suriah dikarenakan ada hal yang ingin dituju yaitu destabilisasi di wilayah timur supaya pemerintahan tersebut mendukung AS secara penuh, dan perolehan sumber daya yang akan diambil alih untuk perusahaan Amerika Serikat. Kepentingan ekonomi membuat Wilayah timur di timur laut Suriah merupakan wilayah yang konsekuensial dikarenakan pada wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam, sebab AS terus mempertahankan pasukannya di wilayah tersebut yang memiliki potensi gas dan minyak bumi di Suriah sebanyak 95 %. Hal ini menjadi kepentingan besar dikarenakan ada ladang Al-Omar ini yang dapat memanifestasikan minyak sehari sebanyak 387 ribu barel dan jugal memiliki cadangan gas setiap tahunnya sebesar 7,8 miliar meter kubik. Tidah hanya ladang minyak yang menjadi sasaran Amerika Serikat namun AS ingin mengendalikan *company* yang paling besar di Suriah yaitu kilang gas Conono, perusahaan tersebut menjadi tujuan AS sebab jika hal itu sudah menjadi kendali AS maka akan memudahkan AS untuk mengendalikan hal yang lainnya.

Kepentingan politik Kepentingan lainnya ialah Amerika Serikat merupakan partner solid untuk Israel dimana Israel ini sedang berkonflik dengan Palestina, maka dengan cara meruntuhkan pemerintahan Bashar Al Assad, karena aksi militer yang ganas rezim Bashar Al Assad jika dilanjutkan ini bisa menjatuhkan ke arah yang tidak memiliki titik terang jika militer terus berlanjut. Keadaan di Suriah yang yang runtuh maka pihak lain yang di bantu Amerika

Serikat ialah Israel, dengan keadaan yang tidak atau belum kondusif berkombinasi dengan apa yang terjadi di Libya, Mesir Irak serta beberapa negara Arab lainnya ini akan membantu semakin besar Israel dalam mendominasi kewenangannya terhadap Palestina, jika Palestina sudah diatasi maka hegemoninya akan menyeluruh ke Timur Tengah tanpa terkecuali. Hal ini merupakan kepentingan Amerika Serikat dalam strategi ganda ini, sebab jika runtuhnya kekuatan islam maka Amerika Serikat akan berkuasa secara penuh dan menjadi *the one and only super power in the world* sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

### **Kebijakan AS Terkait ISIS & Kelompok Ekstrimis Lainnya di Suriah pada Rezim Obama**

Pemerintahan AS dibawah Barack Obama membuat sejumlah kebijakan terkait ISIS dan kelompok ekstrimis lainnya di Suriah. Kebijakan yang dibuat adalah Kontraterorisme dimana kebijakan ini merupakan kebijakan dengan fokus utama melawan teroris demi menyelamatkan warga negara serta menggabungkan antara strategi penggunaan instrument militer, kerjasama dan politik didalamnya. ISIS menyerang suku Yazidi yang merupakan suku minoritas di Suriah. Pada tahun 2014, ISIS telah mengusir lebih dari 36.000 warga dengan identitas suku Yazidi dari Ninewa. ISIS juga melakukan perbuatan keji seperti membunuh dan memperkosa warga dengan identitas suku Yazidi. AS kemudian membuat kebijakan untuk menyelamatkan nyawa warga suku Yazidi dengan mengirimkan bantuan air dan makanan untuk bertahan hidup, selain itu di tahun yang sama Presiden Barack Obama juga mengesahkan serangan udara terhadap ISIS. Hal tersebut dilakukan untuk membuat citra AS sebagai negara yang peduli terhadap warga suku Yazidi sehingga mampu meraih simpati yang kemudian akan dimanfaatkan oleh AS untuk melancarkan kepentingan nasionalnya.

AS juga mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan nomor 2178 mengenai Pejuang Asing pada tahun 2015 (Myers dan

Sengupta, 2015). Resolusi ini disahkan dan disetujui oleh para anggota Dewan Keamanan PBB dengan tujuan dalam menghambat serta meminimalisir gerak dari ISIS dan kelompok ekstrimis lainnya di Suriah. Selain hal tersebut, pelarangan terhadap warga negara-negara anggota untuk kemudian menjadi simpatisan dan bagian dari ISIS serta kelompok ekstrimis lainnya juga diatur dalam resolusi tersebut. AS juga mengeluarkan resolusi PBB untuk menghentikan pendanaan ISIS dengan cara memotong saluran pendapatan kelompok tersebut. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisir akses ISIS dalam mendapatkan sumber dana, mencari dan menemukan perantara atau pihak yang memfasilitasi dimana pihak-pihak ini berperan penting dalam akses keuangan kelompok ekstrimis tersebut untuk kemudian dijatuhkan sanksi serta hukuman. AS juga mengeluarkan resolusi 2165 pada Juli 2014 dan resolusi 2139 pada Februari 2015, kedua resolusi tersebut memiliki tujuan untuk memungkinkan pemberian bantuan ke Suriah namun dengan pemberitahuan sebelumnya. Pemberian bantuan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga kemanusiaan naungan PBB.

Kebijakan AS lainnya saat masa pemerintahan Barrack Obama adalah dengan mengadakan kerjasama internasional 60 negara yang memiliki misi yang sama yaitu ingin melenyapkan ISIS. Kerjasama tersebut dinamakan dengan *U.S Led Coalition* dimana hasil dari kerjasama ini adalah operasi serta serangan militer terhadap ISIS di Suriah yang dimulai dari September 2014 (Katzman, 2015). Tercatat lebih dari 14.000 serangan udara untuk memberantas ISIS dan kelompok ekstrimis lainnya di Suriah diluncurkan sejak serangan udara pertama pada September 2014 (BBC, 2019).

**Kebijakan AS Terkait ISIS & Kelompok Ekstrimis Lainnya di Suriah pada Rezim Trump**  
Lengsernya Barrack Obama digantikan oleh Donald Trump sebagai Presiden AS berikutnya,

hal tersebut mengikuti dengan arah kebijakan yang berubah juga. Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang mengatur bagaimana stabilitas keamanan wilayah AS serta masyarakatnya tidak akan terganggu maupun diganggu oleh warga asing pada tahun 2017. Kebijakan tersebut dinamakan dengan Melindungi Negara dari Teroris Asing yang akan Memasuki Wilayah Amerika Serikat (*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into The United*). Trump melihat bagaimana ISIS dan kelompok ekstrimis lainnya mampu menjadi sebuah gerakan ekstrimis dengan anggota yang banyak tersebar dan menjadi permasalahan global. Kebijakan yang dikeluarkan Trump saat masa pemerintahannya dirasa mampu untuk mencegah masuknya paham ekstrimis ke dalam wilayah negara AS. Kebijakan ini menuai kontroversi dan dianggap tidak adil terhadap warga negara dari negara-negara mayoritas Muslim karena kebijakan tersebut mengatur bagaimana menghentikan sementara masuknya warga negara dari tujuh negara yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman ke Amerika Serikat selama sembilan puluh hari.

Kebijakan tersebut memberlakukan pemeriksaan yang lebih ketat untuk mendapatkan visa melalui Riwayat perjalanan, rekam jejak criminal hingga aktivitas media sosial. Kebijakan yang dikeluarkan Trump juga memuat mengenai pembatalan program penampungan pengungsi dari Suriah tanpa batas waktu (US Federal Register, 2017). Beberapa pengadilan di AS juga memblokir pelaksanaan kebijakan tersebut, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan konstitusi AS dan melanggar hak asasi manusia. Pada Maret 2017, Presiden Trump menerbitkan versi revisi dari kebijakan ini, yang menghapus beberapa negara dari daftar penangguhan masuk dan memberikan pengecualian yang lebih luas untuk beberapa kasus (CSIS, 2017). Trump juga mengeluarkan strategi untuk mengalahkan ISIS dan kelompok ekstremis lainnya dengan melakukan serangan udara terhadap sasaran - sasaran ISIS di Suriah, menekan

negara – negara Arab untuk membantu permasalahan ISIS di Suriah, dan menekan rezim Assad dengan pemberlakuan sanksi ekonomi (Sahide, 2021).

## PENUTUP

Amerika Serikat menerapkan standar ganda pada kebijakannya terkait ISIS dan kelompok pemberontak lainnya di Suriah untuk menjalankan kepentingan nasionalnya. Kepentingan AS terdiri dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan militer. Kepentingan ekonomi AS yaitu dengan menguasai Suriah karena memiliki wilayah yang konsekuensial dimana wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang memiliki potensi gas dan minyak bumi sebanyak 95 %. Terdapat ladang al-omar yang dapat memanifestasikan minyak sehari sebanyak 387 ribu barel dan juga memiliki cadangan gas setiap tahunnya sebesar 7,8 miliar meter kubik. AS ingin mengendalikan *company* yang paling besar di Suriah yaitu kilang gas Conono, jika sudah menjadi kendali AS maka akan memudahkan AS untuk mengendalikan hal yang lainnya.

Kepentingan politik AS dalam menerapkan standar ganda adalah power yang akan didapatkan ketika mampu mengalahkan ISIS di Suriah dan mampu memperluas power di negara Timur Tengah lainnya serta membuat runtuh kekuatan negara Islam maka Amerika Serikat akan berkuasa secara penuh dan menjadi *the one and only super power in the world*. Kepentingan militer AS adalah perluasan hegemoni di Suriah yang akan menyebar ke negara lainnya dengan membangun pangkalan militer disana yang selama ini dikuasai oleh Rusia. Standar ganda AS terkait ISIS dan kelompok pemberontak di Suriah dengan cara memanfaatkan kelompok - kelompok perlawanan yang anti pada rezim Bashar Al Assad untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad. Pendanaan yang dilakukan oleh Amerika pada pemberontak membuat konflik kian berlarut, antara kelompok pemberontak

*Syrian Army- Al Nusa (FSA), Al Nusa Front* dan ISIS yang menewaskan warga sipil, maupun serangan FSA, *Al Nusa Front* pada kota-kota yang dikuasai pemerintah Suriah yang banyak menewaskan warga sipil. Hal tersebut kontras dengan kampanye AS yang selalu mengedepankan hak hidup warga sipil. Kepentingan Amerika Serikat ini digunakan sebagai standar ganda dalam mencapai tujuannya di wilayah konflik Suriah dalam memberantas ISIS tidak lain dalam ikut campurnya AS dalam setiap konflik pasti memiliki kepentingan untuk negaranya sendiri demi tercapainya kepentingan tersebut maka AS perlu terjun langsung ke wilayah tersebut melalui pasukan militernya dan juga melakukan pendanaan dan pelatihan, namun hal yang sebenarnya terjadi ialah untuk meluaskan hegemoni dan juga kepentingan politik serta ekonominya.

## Daftar Pustaka

- Aljazeera. (2012). "Q&A: Nir Rosen on Syria's armed opposition". Diakses melalui <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html> pada 2 Februari 2018.
- BBC. (2019). "Islamic State and The Crisis in Iraq and Syria in Maps". Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034> pada 28 Januari 2023
- Bowman, Bradley L. After Iraq: Future U.S Military Posture in the Middle East, The Washington Quarterly. Spring 2008.
- Cameron Glenn. (2017). Timeline: US Policy on ISIS. Website: <https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-us-policy-isis> akses 5 Juni 2017
- Carpenter, Ted Galen. (2018). Too Many Foreign Policy Double Standards Hurt U.S Credibility. Diakses melalui <https://www.cato.org/commentary/too-many-foreign-policy-double-standards-hurt-us-credibility> pada 8 Januari 2022
- CSIS. (2017). Diakses melalui <https://www.csis.org/analysis/reinforcing-failure>

revised-executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry pada 1 Maret 2022.

Katerina Dalacoura, "The 2011 Uprisings in the Arab Middle East: Political Change and Geopolitical Implications," *International Affairs*, Vol. 88, No. 1 : 2012.

Katzman, Kenneth. (2015). *The Islamic State Crisis and U.S Policy*. Congressional Research Service. Diakses melalui [www.crs.gov](http://www.crs.gov) pada 21 Januari 2023

Lina Khatib 29 Juni 2014. "U S policy on Syria and Iraq: Short on action". Website: <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/06/us-foreign-policy-syria-iraq-be-201462974743184637.html> . Akses 5 juni 2017

Myers, Steven Lee & Sengpta, Somini. (2015). *U.S Presses for UN Resolution to Fight ISIS' Financing*. *New York Times*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2015/12/05/world/middleeast/islamic-state-revenue-united-nations.html> pada 21 Januari 2023

Perwita, A. A., & Yani, Y. M. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Sahide, A. (2021). *Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan* Vol 17 No. 1 2021.

Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara – Negara Muslim*, Mizan Publika: 2007

Sitorus, Tina Herawati. (2018). *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik Suriah 2011-2013*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Syuryansyah dan Adrialius Feraera. (2020). *Perubahan Strategi Diplomasi Amerika Serikat Terhadap Konflik Internal Suriah Pada Tahun 2013-2014*. *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 8, No.1

Thomas Joscelyn. "Al Qaeda and Allies

Permanasari, K.A., Dewi, P.R.K. & Parameswari,

*Announce New Entity in Syria"*. Akses melalui <https://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/al-qaeda-and-allies-announce-new-entity-in-syria.php>. pada 5 Agustus 2018

Thomas Joscelyn. "Hay'at Tahrir Al Sham Leader Calls for Unity in Syrian Insurgency". Akses melalui <https://longwarjournal.org/archives/2017/02/hayat-tahrir-al-sham-leader-calls-for-unity-in-syrian-insurgency.php>. Akses pada 5 Agustus 2018

US Federal Register. 2017. *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*. Diakses melalui <https://www.federalregister.gov/documents/2017/03/09/2017-04837/protecting-the-nation-from-foreign-terrorist-entry-into-the-united-states> pada 2 Maret 2022.

VOA. (2016). "Laporan: Korban Tewas karena Perang Suriah Menjadi 470.000" dalam, <https://www.voaindonesia.com/a/laporankorban-tewas-karena-perang-suriah-menjadi470000/3187210.html>, diakses pada 3 Februari 2018.

Wahyudi, H. (2016). *Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kudeta Mesir 2013*. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Yacoubian, Mona. (2018). *U.S Policy Toward Syria: Part I*. Diakses melalui <https://www.usip.org/publications/2018/09/us-policy-toward-syria-part-i> pada 26 Januari 2022

Young, Michael. (2013). *Double Standards as the U.S Fails to Act while Syria Suffers*. Diakses melalui <https://www.thenationalnews.com//doublestandards-as-the-us-fails-to-act-while-syriasuffers-1.341624> pada 19 Februari 2022

